

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal.

Maksud penyusunan laporan keuangan :

- 1) Laporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Pelaporan keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/ 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 - 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/ 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
 - 24) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 - 25) Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 26) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Pajak Daerah;
 - 27) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Retribusi Daerah;
 - 28) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 31) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal;
- 32) Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- 33) Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- 34) Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- 35) Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan .
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan .
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan .

Bab II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan .

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan .
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan .

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran [LRA] .
 - 5.1.1 Pendapatan -LRA
 - 5.1.2 Belanja

5.2. Laporan Operasional [LO]

5.2.1. Pendapatan –LO

5.2.2. Beban

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas [LPE]

5.3.1. Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

5.4.2 Kewajiban

5.4.3 Ekuitas dana

Bab IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan dan fisik SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan adalah sebesar 90,15 % dan 100 % dengan perincian:

2.1.1. Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah = Rp. 0,00

2.1.2. Belanja

Jumlah Dana DPAPenetapan 2022 = Rp. 8.147.161.000,-

Jumlah Dana DPA Pergeseran 2022 = Rp. 7.850.311.000,-

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 7.077.247.017,-

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		TAMBAH KURANG	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KEU	CAPAIAN FISIK
		PENETAPAN	PERUBAHAN					
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.147.161.000	7.850.311.000	296.850.000	7.850.311.000	7.077.247.017	90,57	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.692.911.000	4.673.411.000	19.500.000	4.673.411.000	4.232.704.444	90,83	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.500.000	30.000.000	19.500.000	30.000.000	29.949.250	99,97	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.500.000	25.000.000	19.500.000	25.000.000	24.991.750	99,15	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	4.957.500	99,08	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.175.082.000	3.175.082.000	-	3.175.082.000	2.891.975.678	90,99	100
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.085.082.000	3.085.082.000	-	3.085.082.000	2.807.185.928	90,21	100

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000	84.799.750	#CIV/01	0
5	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah(SPPD)	0	-	-	-	-	33,00	80
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	11.987.066	30,00	80
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	11.987.066	92,71	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.500.000	273.500.000	-	273.500.000	253.593.477	88,93	100
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	17.985.000	89,97	100
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000	69.278.800	91,80	100
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.500.000	66.500.000	-	66.500.000	61.049.100	71,53	100
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	25.035.750	98,33	100
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000	12.000.000	-	12.000.000	11.800.000	97,74	100
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000	68.416.927	96,90	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.200.000	244.200.000	-	244.200.000	241.514.680	96,90	100
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244.200.000	244.200.000	-	244.200.000	241.514.680	92,18	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.548.000	203.548.000	-	203.548.000	187.280.945	98,90	100
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	1.958.000	92,48	100
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	188.000.000	188.000.000	-	188.000.000	155.090.342	78,15	100
15	Penyediaan Jasa-jasa Pelayanan Umum	13.548.000	13.548.000	-	13.548.000	10.181.603	90,01	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	707.081.000	707.081.000	-	707.081.000	636.442.348	73,48	96,99

16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.000.000	252.000.000	-	252.000.000	185.181.498	99,50	100
17	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	8.950.000	87,88	100
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	90.000.000	-	90.000.000	88.089.100	99,48	100
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	355.081.000	355.081.000	-	355.081.000	353.221.750	99,54	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN dan EVALUAS PEMBANGUNAN DAERAH	668.250.000	656.250.000	12.000.000	656.250.000	591.196.100	90,46	100
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	355.700.000	343.700.000	12.000.000	343.700.000	328.080.380	100,00	100
20	Pelaksanaan Konsultasi Publik	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	99,98	100
21	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/Kota	40.000.000	28.000.000	12.000.000	28.000.000	27.987.500	94,81	100
22	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	300.700.000	300.700.000	-	300.700.000	285.092.880	95,81	100
	Kegiatan Analisa Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	105.300.000	105.300.000	-	105.300.000	88.782.500	92,18	100
23	Analisa Data Dan Informasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	75.300.000	75.300.000	-	75.300.000	69.412.500	92,90	100
24	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	29.370.000	98,74	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	207.250.000	207.250.000	-	207.250.000	167.333.220	89,82	100
25	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	67.215.300	90,82	100
26	Pengendalian Pelaksanaan Kejasama Daerah	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	13.705.000	80,57	100

27	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	107.250.000	107.250.000	-	107.250.000	66.412.929	67,42	100
	PROGRAM KOORDINASI dan SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.766.000.000	1.640.150.000	-125.850.000	1.640.150.000	1.433.900.781	67,87	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	735.000.000	670.000.000	65.000.000	670.000.000	588.720.476	95,62	100
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RRPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.000.000	25.000.000	15.000.000	25.000.000	24.155.000	61,64	100
29	Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.000.000	25.000.000	15.000.000	25.000.000	22.909.000	72,57	100
30	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40.000.000	25.000.000	15.000.000	25.000.000	18.143.500	64,30	100
31	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	40.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	25.268.500	60,07	100
32	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	67.552.888	61,13	100
33	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	45.844.927	64,53	100

34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100.000.000	90.000.000	10.000.000	90.000.000	85.075.756	81,31	100
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	325.000.000	325.000.000	-	325.000.000	296.750.931	90,29	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	365.000.000	365.000.000	-	365.000.000	329.513.485	90,04	100
36	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.000.000	65.000.000	-	65.000.000	62.183.500	94,47	100
37	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	38.189.830	94,62	100
38	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	25.848.900	64,62	100
39	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	38.355.550	94,99	100
40	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	70.000.000	70.000.000	-	70.000.000	66.483.021	93,95	100

41	Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	32.883.664	89,11	100
42	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	35.945.000	89,24	100
43	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	31.934.900	85,21	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	668.000.000	605.150.000	60.850.000	605.150.000	515.866.820	83,52	100
44	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.000.000	32.315.800	7.684.200	32.315.600	30.222.800	63,58	100
45	Asisten Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	31.785.800	8.214.200	31.785.800	20.208.500	62,37	100
46	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40.000.000	34.121.300	5.878.700	34.121.300	28.104.750	82,26	100
47	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	141.000.000	141.000.000	-	141.000.000	135.727.444	82,83	100
48	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dokumen Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	40.000.000	30.025.000	9.975.000	30.025.000	24.859.000	76,90	100

49	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	40.000.000	32.400.000	7.600.000	32.400.000	24.916.828	60,34	100
50	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50.000.000	26.502.500	21.497.500	26.502.500	25.834.500	82,12	100
51	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	275.000.000	275.000.000	-	275.000.000	226.643.000	82,73	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.070.000.000	660.300.000	139.500.000	690.500.000	618.445.692	65,02	99,88
52	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	95.500.000	53.000.000	43.500.000	53.000.000	50.361.000	96,90	99,31
53	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum	45.000.000	10.600.000	35.000.000	10.000.000	9.690.000	96,13	100
54	Pengelolaan Data Kebijakan dan Peraturan	31.500.000	23.000.000	6.500.000	23.000.000	22.800.900	80,36	100
55	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	17.671.000	83,06	100
	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	203.500.000	196.500.000	7.000.000	196.500.000	182.664.385	89,81	100
56	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	118.500.000	118.500.000	-	118.500.000	106.426.750	96,96	100
57	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	29.087.500	98,48	100
58	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	34.467.635	99,10	100

59	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	20.000.000	13.000.000	7.000.000	13.000.000	12.982.500	97,71	100
	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	245.000.000	242.000.000	3.000.000	242.000.000	236.447.000	96,79	100
60	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	29.037.500	96,79	100
61	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	29.837.500	98,88	100
62	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	34.000.000	34.000.000	-	34.000.000	33.345.500	98,04	100
63	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	28.000.000	28.000.000	-	28.000.000	27.450.000	97,86	100
64	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	95.000.000	92.000.000	3.000.000	92.000.000	89.851.500	96,86	100
65	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	28.000.000	28.000.000	-	28.000.000	27.126.000	95,14	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	475.000.000	389.000.000	86.000.000	389.000.000	346.773.307	94,74	100
66	Penelitian, Pengembangan, dan Perwujudan di Bidang Teknologi dan Inovasi	190.000.000	170.000.000	10.000.000	170.000.000	161.062.807	89,33	100
67	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	120.000.000	80.000.000	40.000.000	80.000.000	71.463.000	89,56	100
68	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	50.000.000	19.000.000	31.000.000	19.000.000	15.866.000	84,40	100
69	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kaitbangan	95.000.000	95.000.000	-	95.000.000	80.179.500	72,81	100
70	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	30.000.000	25.000.000	5.000.000	25.000.000	18.203.000	60,15	100

Dalam rangka pencairan dana, Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PPK dan oleh PPK diverifikasi serta dibuatkan SPM untuk mengajukan penerbitan SP2D di BUD.

Adapun SPP yang dapat direalisasikan terdiri dari :

1 SPP LS Gaji dan tunjangan	Rp.	2.807.185.928,-
2 SPP Uang Persediaan	Rp.	345.000.000,-
3 SPP Ganti Uang	Rp.	3.101.150.320,-
4 SPP Tambahan Uang	Rp.	0,-
5 SPP LS Non Gaji	Rp.	<u>1.170.360.379,-</u>
6 Jumlah	Rp.	7.423.696.627,-

Dilihat dari pencapaian indikator kinerja keuangan :

1. Belanja Operasi

Belanja operasi berupa Belanja Pegawai yang meliputi Biaya Gaji dan Tunjangan, Belanja Pegawai Non Gaji dan Belanja Barang/Jasa. Pagu Anggaran Penetapan Rp. 7.902.961.000,- sedangkan pagu Perubahan (Perkada) Rp. 7.606.111.000,- dengan realisasi kinerja keuangan mencapai Rp. 7.077.247.017,- (89,87 %).

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk membiayai Belanja Modal Peralatan dan Mesin pagu anggaran Rp. 244.200.000,- dengan realisasi kinerja keuangan mencapai Rp. 241.514.680,- (98,90 %).

3. Secara total pagu anggaran Penetapan Rp. 8.147.161.000,- sedangkan pagu Perubahan (Perkada) Rp. 7.850.311.000,- dengan realisasi kinerja keuangan mencapai Rp. 7.077.247.017,- (90,15 %), yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia di bidang dan Sub Bagian Keuangan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional dan sistem/mechanisme dan prosedur dalam pencairan dan pertanggungjawaban oleh sebagian PPTK karena keterbatasan tenaga.
3. Pemberlakuan SPJ tunai dan non tunai dalam melaksanakan pekerjaan keuangan menemui kesulitan karena entri di rekening Koran dan bukti pemindah bukuan atau transfer tidak sama rinciannya.
4. Sistem informasi penatausahaan keuangan yang tersedia belum berjalan optimal dalam upaya mendukung proses penatausahaan yang efektif dan efisien;.
5. Penyediaan dana yang tidak sesuai dengan anggaran kas, sehingga mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban keuangan.
6. Perubahan/penggeseran yang terlalu lama sehingga mengakibatkan keragu-raguan dalam pelaksanaan kegiatan.
7. Permasalahan yang rutin setiap tahun terjadi adalah penumpukan pelaksanaan kegiatan di akhir tahun.

Upaya mengatasi kendala/permasalahan antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat, Bagian Keuangan dan BPKAD.
2. Melakukan koordinasi, pengendalian dan pembinaan kepada PPTK agar pembutan dan penyampaian SPJ yang lengkap dan benar kepada Bendahara Pengeluaran secepat mungkin, dan tidak menunggu sampai menumpuk.
3. PPK maupun Bendahara pengeluaran harus cermat dalam entri di Simda keuangan dalam pertanggungjawabannya.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang tersedia memadai
2. Meningkatnya pemahaman dari para Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang diembannya;
3. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan dan tri wulan.
4. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian target perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan.
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf Bappedalitbang sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 RINCIAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN.

3.1.1. PENDAPATAN - LRA

Anggaran dan realisasi Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2022 dan 2021 pada Bappedalitbang Kab.Tegal adalah sebagai berikut :

No.	Akun	Anggaran 2022 (Rp.)	Anggaran 2021 (Rp.)
1	2	3	4
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	0.00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah [PAD] yang sah adalah pendapatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00. Pendapatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah [PAD] yang sah tahun 2022 terdiri dari:

- Nihil

3.1.2 BELANJA

Anggaran dan realisasi belanja yang dikelola Bappedalitbang Kab. Tegal Tahun Anggaran 2022 serta Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Akun	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Pegawai	3.272.967.000	3.272.967.000	2.981.280.928	91,09	3.266.983.803
2	Belanja Barang dan Jasa	4.629.994.000	4.333.144.000	3.854.451.409	83,25	3.674.113.564
3	Belanja Modal	244.200.000	244.200.000	241.514.660	98,90	324.615.800
	Jumlah	8.147.161.000	7.850.311.000	7.077.247.017	90,15	7.265.713.167

Realisasi belanja pada Bappedalitbang Kab. Tegal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.077.247.017,- atau 90,15% dari anggaran sebesar Rp 7.850.311.000,- turun sebesar Rp 188.466.150,- dibanding realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7.265.713.167,-.

1. Belanja Pegawai

No.	Akun	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2020 (Rp.)
		Penetapan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Belanja Gaji & Tunjangan	3.085.082.000	3.085.082.000	2.807.185.928	90,99	2.881.138.803
1.2	Belanja Pegawai Non Gaji dan Tunjangan	187.885.000	187.885.000	174.095.000	92,66	385.848.000
	Jumlah	3.272.967.000	3.272.967.000	2.981.280.928	91,09	3.266.986.803

Realisasi Belanja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.981.280.928,-. Belanja Pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.266.986.803,-, menurun sebesar Rp. 285.705.875,- dibandingkan Tahun 2021.

1.1 Belanja Pegawai – Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja pegawai – gaji dan tunjangan Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Akan	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	6
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.255.508.308	2.236.508.308	2.034.436.120	91,01	2.096.900.640
2	Tunjangan Keluarga	245.141.684	245.141.684	220.869.878	90,10	234.522.230
3	Tunjangan Jabatan	205.310.000	181.100.000	180.740.000	99,80	219.550.000
4	Tunjangan Fungsional	55.790.000	100.000.000	94.540.000	94,54	42.110.000
5	Tunjangan Fungsional Umum	50.850.000	50.850.000	38.040.000	70,88	39.595.000
6	Tunjangan Beras	137.989.800	137.989.800	125.721.120	91,11	132.021.660
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	11.900.140	11.900.140	10.340.073	86,89	9.176.106
8	Pembulatan Gaji	100.608	100.608	24.575	24,43	28.550
9	Iuran BPJS Kesehatan	102.311.690	102.311.690	87.787.713	85,80	90.091.911
10	Iuran JKK	5.109.910	5.109.910	4.171.600	81,64	4.285.655
11	Iuran JKM	15.069.860	15.069.860	12.514.849	83,05	12.657.042
Jumlah		3.085.082.000	3.085.082.000	2.807.185.928	90,99	2.881.138.803

Realisasi Belanja Pegawai – gaji dan tunjangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.807.185.928,-. Belanja Pegawai – gaji dan tunjangan pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.881.138.803,- meningkat sebesar Rp. 72.952.875,- dibandingkan Tahun 2021.

1.2 Belanja Pegawai – Non Gaji dan Tunjangan

Realisasi belanja Pegawai – Langsung Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Akun	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	127.870.000	127.870.000	117.240.000	91,69	325.585.000
2	Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang Dan Jasa	60.015.000	60.015.000	56.853.000	94,73	60.260.000
Jumlah		187.885.000	187.885.000	174.095.000	92,66	385.845.000

Realisasi Belanja Pegawai – Non Gaji dan Tunjangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 174.095.000,-. Belanja Pegawai – Non Gaji dan Tunjangan pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 385.845.000,- menurun sebesar sebesar Rp. 211.750.000,- dibandingkan Tahun 2021.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Akun	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Penggeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja bahan pakai habis	1.390.289.400	1.254.394.100	1.107.879.670	88,32	1.022.396.915
2	Belanja jasa kantor	1.149.655.000	946.645.000	848.371.442	89,62	878.513.238

3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.548.000	13.548.000	10.181.603	75,15	
4	Belanja sewa peralatan dan mesin	11.400.000	11.400.000	11.400.000	100,00	2.400.000
5	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker	2.640.000	2.640.000	0	0,00	21.400.000
6	Belanja Jasa Konsultan Konstruksi	180.000.000	180.000.000	150.535.000	83,63	15.000.000
7	Belanja jasa konsultan non konstruksi	75.000.000	115.480.000	115.032.000	99,61	250.197.000
8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan	116.810.000	116.810.000	76.700.066	65,66	12.000.000
9	Belanja Pemeliharaan	314.420.200	314.420.200	312.069.948	99,25	250.477.074
10	Belanja Perjalanan dinas	1.067.575.900	1.067.575.900	913.531.680	85,57	420.729.337
11	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	317.000.000	317.000.000	308.750.000	97,40	801.000.000
Jumlah		4.638.338.500	4.339.913.200	3.854.451.409	88,81	3.674.113.564

Realisasi belanja Barang dan Jasa pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.854.451.409,-. Barang dan Jasa pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.674.113.564,- naik sebesar Rp. 180.337.845,- dibandingkan Tahun 2021.

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi belanja bahan pakai habis Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

No.	Belanja Bahan Pakai Habis	Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
-----	---------------------------	---------------------	----------------------	---	----------------------

		Penetapan	Penggeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	138.000.000	137.210.000	88.659.800	64,62	79.719.550
2	Belanja Bahan-Bahan Baku	2.851.200	2.851.200	2.613.600	91,67	
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.000.000	4.500.000	4.500.000	100,00	
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.268.000	19.268.000	19.137.000	99,32	
5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	17.612.000	18.402.000	6.000.000	32,61	
6	Belanja alat tulis kantor	49.889.300	41.267.300	40.609.800	98,41	93.412.415
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	328.889.900	319.906.600	291.053.970	90,98	368.111.350
8	Belanja alat listrik dan elektronik	20.000.000	20.000.000	17.985.000	89,93	14.514.600
9	Belanja perangkai, materiail dan benda pos lainnya	5.790.000	3.220.000	2.681.000	83,26	4.450.000
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	33.000.000	36.850.000	35.350.000	95,93	
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	20.000.000	20.000.000	17.985.000	89,93	
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.112.700	12.637.700	12.504.000	98,94	-
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor				-	1.500.000
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata				-	5.172.000
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya				-	9.873.500

16	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	664.037.500	570.092.500	523.911.500	91,90	377.760.000
17	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu				-	11.487.500
18	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	33.868.800	32.218.800	26.904.000	83,50	16.816.000
19	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	-	4.500.000
20	Belanja Pakaian Olahraga	35.970.000	35.970.000	35.970.000	100,00	35.080.000
Jumlah		1.410.289.400	1.274.394.100	1.125.864.670	88,35	1.022.396.915

Realisasi belanja bahan pakai habis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.125.864.670,-. Belanja bahan pakai habis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.022.396.915,- naik sebesar Rp. 103.467.755,- dibandingkan Tahun 2021.

2. Belanja Jasa Kantor

Realisasi belanja jasa kantor Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Belanja Jasa Kantor	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	369.500.000	225.900.000	186.700.000	82,65	207.675.000
2	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.885.000	67.910.000	61.365.000	90,36	80.020.000
3	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	75.920.000	75.920.000	74.820.000	98,55	

4	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	11.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00	
5	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	176.340.000	155.415.000	144.300.000	92,85	100.425.000
6	Belanja Jasa Tenaga Ahli				-	108.050.000
7	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	198.000.000	198.000.000	196.491.600	99,24	111.240.000
8	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara				-	94.435.000
9	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.510.000	-	-	-	
10	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Fotoretretan	9.500.000	7.500.000	7.500.000	100,00	35.800.000
11	Belanja telepon	5.000.000	3.000.000	1.307.740	43,59	1.419.008
12	Belanja air	20.000.000	15.182.000	7.548.500	49,72	9.630.000
13	Belanja listrik	96.000.000	126.000.000	110.161.137	87,43	72.735.287
14	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000	12.000.000	11.800.000	98,33	9.360.000
15	Belanja kawat/faksimili/internet	67.000.000	43.818.000	36.072.965	82,32	38.114.243
16	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.000.000	15.000.000	9.304.500	62,03	9.609.700
Jumlah		1.149.655.000	946.645.000	848.371.442	89,62	878.513.238

Realisasi belanja jasa kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 848.371.442,-. Belanja jasa kantor pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 878.513.238,- turun sebesar Rp. 30.141.796,- dibandingkan Tahun 2021.

3. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi.

Realisasi belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.748.000	11.748.000	9.054.869	77,07	0
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non	1.800.000	1.800.000	1.126.734	62,59	0
Jumlah		13.548.000	13.548.000	10.181.603	75,15	0

Realisasi belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.181.603,-. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- naik sebesar Rp. 10.181.603,- dibandingkan Tahun 2021. Belanja tersebut untuk tenaga Non ASN.

4. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin.

Realisasi belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja sewa sarana mobilitas	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100,00	
2	Belanja sewa mebel	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	
Jumlah		11.400.000	11.400.000	11.400.000	100,00	-

Realisasi belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.400.000,-. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- naik sebesar Rp. 11.400.000,- dibandingkan Tahun 2021.

5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Belanja Gedung dan Bangunan	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker	2.640.000	2.640.000	-	-	21.400.000
	Jumlah	2.640.000	2.640.000	-	-	-

Realisasi belanja Sewa Gedung dan Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,-. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan pada Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 21.400.000,- turun sebesar Rp. 21.400.000,- dibandingkan Tahun 2021

6. Belanja jasa konsultan non konstruksi

Realisasi jasa konsultan non konstruksi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7

1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	75.000.000	75.000.000	74.628.000	99,50	250.197.000
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	-	40.480.000	40.404.000	99,81	
Jumlah		75.000.000	115.480.000	115.032.000	99,61	250.197.000

Realisasi belanja jasa konsultan non konstruksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 115.032.000,-. Belanja jasa konsultan non konstruksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 250.197.000,- turun sebesar Rp. 135.165.000,- dibandingkan Tahun 2021

7. Realisasi belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sebagai berikut:

No.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan	Anggaran 2022 (Rp.)		Realisasi 2022 (Rp.)	%	Realisasi 2021 (Rp.)
		Penetapan	Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja kursus Singkat/Pelatihan	29.710.000	40.310.000	12.560.066	31,16	12.000.000
2	Belanja sosialisasi	87.100.000	76.500.000	64.140.000	83,84	
Jumlah		116.810.000	116.810.000	76.700.066	65,66	12.000.000

Realisasi belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 76.700.066,-. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan pelatihan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.500.000	-	7.500.000
Belanja Tagihan Telepon	1.307.740	-	1.307.740
Belanja Tagihan Air	7.548.500	-	7.548.500
Belanja Tagihan Listrik	110.161.137	-	110.161.137
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.800.000	-	11.800.000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.072.965	-	36.072.965
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.304.500	-	9.304.500
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.504.869	-	9.504.869
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.126.734	-	1.126.734
Belanja sewa sarana mobilitas	9.000.000	-	9.000.000
Belanja sewa mebel	2.400.000	-	2.400.000
Belanja sewa peralatan dan mesin		2.400.000	-2.400.000
Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parker		21.400.000	-21.400.000
Uang untuk diberikan kepada masyarakat	308.750.000	801.000.000	-492.250.000
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS.	12.560.066	12.000.000	560.066
Belanja Sosialisasi	64.140.000	-	64.140.000
Beban Pemeliharaan	312.069.948	250.477.074	61.592.874
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin		- 114.587.074	-114.587.074

sebesar Rp 0,00, turun sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo Tahun 2020 sebesar Rp. 0,00.

b. Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 1.260.000,00	Rp. 4.619.800,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Bappedalitbang Kab.Tegal. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.**1.260.000,00** turun sebesar Rp. 3.359.800 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **4.619.800,00** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1	2	3	3
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	-	2.563.200
2	Persediaan Bahan komputer	-	508.000
3	Penyediaan komponen instalasi listrik	1.260.000	1.548.600
Jumlah		1.260.000	4.619.800

c. Piutang Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 0,00	Rp. 0,00

Piutang pajak daerah yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00. dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1	Pajak Hotel	0,00	0,00
2	Pajak Restoran	0,00	0,00
3	Pajak Hiburan	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	0,00	0,00
5	Pajak Galian Golongan C	0,00	0,00
6	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

d. Piutang Retribusi	31 Desember 2022	31 Desember 2020
	Rp	Rp.
	0,00	0,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 naik/turun sebesar Rp. 0,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00
2	Retribusi Sewa Kios Pasar	0,00	0,00
3	Restribusi Sewa Kios Pasar	0,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan -RSUD	0,00	0,00
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan -Puskesmas	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

e. Piutang Angsuran Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp	Rp.
	0,00	0,00

Piutang Angsuran Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan

139.749.800,- dan alat kantor Rp. 15.500.000,- hasil reklas dari belanja modal jaringan listrik. Rincian peralatan dan Mesin sebagai berikut:

No.	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Alat-alat bantu	192.436.000	192.436.000	-
2	Alat angkutan darat bermotor	1.783.306.875	1.795.306.875	12.000.000
3	Alat angkutan darat tak bermotor	4.357.311	4.357.311	-
4	Alat ukur	17.200.000	17.200.000	-
5	Alat kantor	308.066.454	292.566.454	15.500.000
6	Alat rumah tangga	1.253.627.751	1.113.877.951	139.749.800
7	Komputer unit	549.586.962	557.966.962	8.380.000
8	Peralatan komputer	196.007.159	187.627.159	8.380.000
9	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	230.827.500	220.682.300	10.145.200
10	Alat studio	352.946.633	352.946.633	-
11	Alat komunikasi	66.582.000	66.582.000	-
12	Alat kedokteran	3.767.500	3.767.500	-
13	Unit-unit laboratorium	2.500.000	2.500.000	-
	Jumlah	4.961.212.145	4.807.817.145	153.395.000

Penjelasan naik/turunnya masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut :

- 1) Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.783.306.875,- naik/turun sebesar Rp. 0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.795.306.875,-. Selisih Rp. 12.000.000,- yaitu asset yang dihapuskan pada alat angkut darat bermotor.
- 2) Saldo Alat Kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp 308.066.454,- naik sebesar Rp 15.500.000,- dibandingkan saldo

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.478.861.397,- naik sebesar Rp 76.119.680,- dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.402.741.717,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Tugu/tanda batas	4.478.861.397	4.402.741.717	76.119.680
	Jumlah	4.478.861.397	4.402.741.717	76.119.680

Penjelasan naik/turunnya masing-masing kelompok Gedung dan Bangunan sebagai berikut :

- 1). Saldo Tugu/Tanda Batas kerja per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.402.741.717,- naik sebesar Rp 76.119.680,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.402.741.717,-

Mutasi nilai gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 4.402.741.717,-
Mutasi tambah (reklas dari belanja gedung tempat kerja ke belanja tugu/tanda batas).	<u>Rp. 76.119.680,-</u>
Saldo per 31 Desember 2022	Rp. 4.478.861.397,-
Akumulasi penyusutan	<u>Rp.(1.376.775.140,-)</u>
Nilai buku per 31 Desember 2022	Rp. 3.102.086.257,-

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.578.033.478,- naik/turun sebesar Rp. 0,- dibandingkan saldo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.578.033.478,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Jalan	2.239.649.528	2.239.649.528	-
2	Jembatan	-	-	-
3	Jaringan listrik	288.548.950	288.548.950	-
4	Jaringan telepon	49.835.000	49.835.000	-
	Jumlah	2.578.033.478	2.578.033.478	-

Penjelasan naik/turun masing-masing kelompok Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

- 1) Saldo Jalan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.239.649.528,- naik/turun sebesar Rp. 0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.239.649.528,-.
- 2) Saldo Jembatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,- saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0,-.
- 3) Saldo Jaringan Listrik per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 288.548.950,- naik/turun sebesar Rp. 0,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 288.548.950,-.

Mutasi nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 2.578.033.478,-
Mutasi tambah (reklas)	Rp. <u>0,-</u>
Saldo per 31 Desember 2022	Rp. 2.578.033.478,-
Akumulasi penyusutan	Rp. <u>(2.305.236.510,-)</u>
Nilai buku per 31 Desember 2022	Rp. 272.796.968,-

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp 563.857.600,-, saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 563.857.600,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	535.464.600	535.464.600	-
2	Barang Bercorak Kesenian	5.521.000	5.521.000	-
3	Alat Bercorak Kebudayaan	22.872.000	22.872.000	-
	Jumlah	563.857.600	563.857.600	-

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

- 1) Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 535.464.600,- saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 535.464.600,-,
- 2) Saldo Barang Bercorak Kesenian per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.521.000,- saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.521.000,-,
- 3) Saldo alat bercorak kebudayaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 22.872.000,- saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 22.872.000,-.

Mutasi nilai Aset Tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp. 563.857.600,-
Mutasi tambah (pembelian)	Rp. <u>0,-</u>
Saldo per 31 Desember 2022	Rp. 563.857.600,-
Akumulasi penyusutan	Rp. <u>0,-</u>
Nilai buku per 31 Desember 2022	Rp. 563.857.600,-

f. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. (7.7.804.888.354,-) dan Rp. (7.373.339.507,-). Akumulasi penyusutan merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan [KDP]. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Amumulasi Penyusutan	Nilai buku
1	2	3	4	5
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	4.961.212.145	4.122.876.704	838.335.441
3	Gedung dan Bangunan	4.478.861.397	1.376.775.140	3.102.086.257
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.578.033.478	2.305.236.510	272.796.968
5	Aset Tetap Lainnya	563.857.600	-	563.857.600
	Jumlah	12.581.964.620	7.804.888.354	4.777.076.266

C. ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset berwujud kondisinya rusak berat yang dimiliki Bappedalitbang Kab. Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset lainya dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Tegal melalui pembelian. Penambahan aset lainnya berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset lainya, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset lainnya yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku.

Berikut adalah saldo aset lainya yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut :

No.	Aset Lainnya	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	3	5
1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.404.000	-	40.404.000
2	Aset lain-lain	257.551.280	257.551.280	-
	Jumlah	297.955.280	257.551.280	40.404.0

1. Aset Tidak Berwujud Lainnya.

Saldo aset asset tidak berwujudnya lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 40.404.000,- saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- terdapat kenaikan saldo sebesar Rp. 40.404.000,- .Saldo ini merupakan reklas dari belanja barang jasa yaitu belanja jasa konsultansi berorientasi layanan- jasa khusus.

2. Aset lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 257.551.280,- saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 257.551.280,- tidak ada penurunan maupun kenaikan saldo.

No.	Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Naik [Turun]
1	2	3	4	5
1	Aset lain-lain yang rusak berat	257.551.280,-	257.551.280,-	-
2	Jumlah	257.551.280,-	257.551.280,-	-

3.1.6 KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas (12) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek per 31 Desember

2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 13.640.857,- dan Rp. 20.220.142,-. Kewajiban jangka pendek tersebut terdiri dari Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), utang belanja dan utang jangka pendek lainnya.

1. Utang Belanja.

Nilai Utang Beban per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp. 13.656.857,- dan 20.220.142,-. Utang Beban tersebut berupa utang beban kepada pihak ketiga atas beban jasa listrik, telepon, internet, air yang masih harus dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Utang Belanja	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1	2	3	3
1	Utang beban jasa listrik	9.592.512	16.377.313
2	Utang beban jasa air	899.500	710.500
3	Utang beban jasa telepon	112.345	157.329
4	Utang beban jasa internet	3.052.500	2.975.000
	Jumlah	13.656.857	20.220.142

3.1.7. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ekuitas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5.052.533.689,- turun sebesar Rp.168.527.682,- dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.221.061.371,- Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 5.066.190.546,- dan jumlah kewajiban dan ekuitas dana Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 5.241.281.513,-.

3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai Pendapatan LRA Tahun Anggaran 2022 dengan Nilai Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 0,- (Nihil).

Nilai Belanja pada LRA sebesar Rp. 6.835.732.337,- dan Nilai Beban pada Laporan Operasional sebesar Rp. 6.832.512.852,- selisih antara belanja dan beban sebesar Rp. 3.219.485,-

Nilai Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.519.840.393,- Nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.234.718.228,- selisih antara Aset dan kewajiban sebesar Rp. 13.656.857,- pada utang belanja (tagihan listrik, air, telpon dan internet).

BAB. IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUNGAN SKPD

1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Bappedalitbang Kabupaten Tegal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Struktur Organisasi

Adapun susunan organisasi beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian

Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penetapan rencana kerja;
 - b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.
- b. Sekretariat
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan. Sekretariat terdiri atas :
- 1) Kepala Subbagian Keuangan
 - 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Kelompok Unsur Perencana
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas :

- 1) Kelompok Unsur Infrastruktur
- 2) Kelompok Unsur Kewilayahan

g. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penyelenggaraan urusan/program Penelitian dan Pengembangan sebagai bagian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

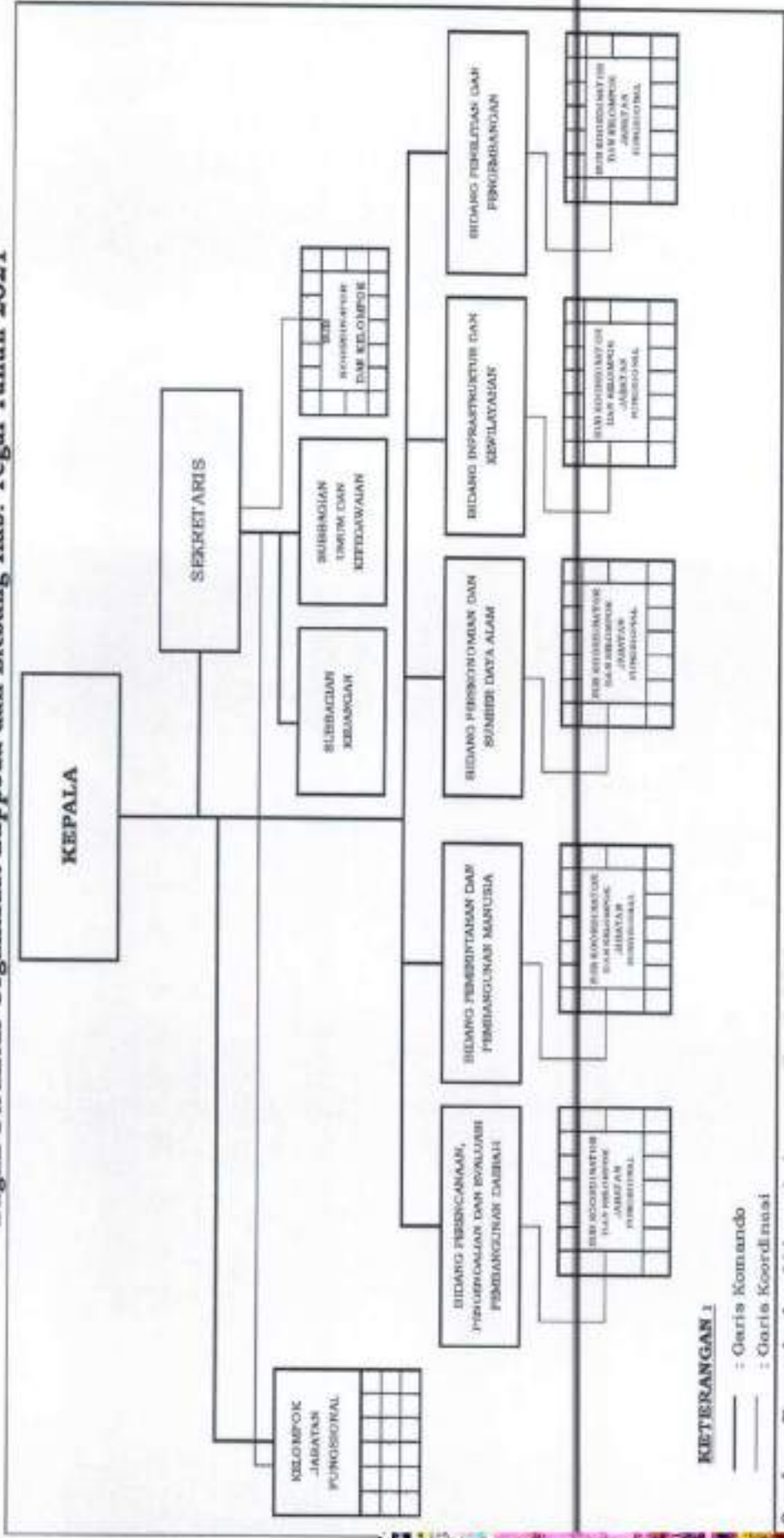
Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Kelompok Unsur Sosial dan Pemerintahan
- b. Kelompok Unsur Ekonomi dan Pembangunan
- c. Kelompok Unsur Inovasi dan Teknologi

Di samping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang kedudukannya langsung berada di bawah Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal.

Untuk lebih lengkapnya, bagan organisasi Bappedalitbang Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar. 1.1.
 Bagan Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kab. Tegal Tahun 2021



KETERANGAN :

- : Ooris Komando
- : Ooris Koordinasi

Sumber : Bappeda dan Litbang kabupaten Tegal, 2022



Sebagaimana Gambar 1.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Bappedalitbang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Kepala

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi

- a. penetapan rencana kerja;
- b. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan informasi perencanaan pembangunan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- e. pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- g. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.;
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan daerah.

2) Sekretaris

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. pengoordinasian penyiapan bahan pe



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Badan; /

- c. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas badan;
- g. pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sekretaris membawahkan 3 (tiga) sub koordinator Perencanaan, Subbag Keuangan, dan Subbag Umum dan Kepegawaian, dengan fungsi:

- 1) Sub Koordinator Perencanaan;
 - a. penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan Badan;
 - c. penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Badan;
 - d. penelaahan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan;
 - e. penelaahan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - f. pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang perencanaan badan;
 - g. pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
 - h. pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas



2) Subbagian Keuangan;

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan Badan;
- c. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
- d. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan keuangan Badan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset Badan;
- f. Pengelolaan kearsipan Badan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Melakukan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah;
- g. Mengoordinasikan penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
- h. Pelaksanaan konsultasi publik;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum SKPD/lintas SKPD;
- j. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
- k. Pengoordinasian penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten;
- l. Melakukan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
- m. Melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan dan pembangunan SKPD;
- n. Penyusunan profil pembangunan daerah;
- o. Pengoordinasian pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten;
- p. Pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah; dan
- q. Melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.
- r. Pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.



Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan 3 (tiga) sub koordinator yaitu Perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi :

- 1) Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Perencanaan dan Pendanaan
- 2) Sub Koordinator Data dan Informasi : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Data dan Informasi.
- 3) Sub Koordinator Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;



- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program dan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan perencanaan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan 3 (tiga) sub koordinator yaitu Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat dengan fungsi :

- 1) Sub Koordinator Pemerintahan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan dibidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Koordinator Pembangunan Manusia : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, asistensi, monitoring dan evaluasi perencanaan di bidang Pembangunan Manusia.
 - 3) Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menyiapkan bahan pengoordinasian, asistensi, monitoring dan evaluasi perencanaan di bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- 5) Kepala Bidang Perekonomian dan SDA
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA;



- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian dan SDA;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian dan SDA;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang perekonomian dan SDA;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang perekonomian dan SDA;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang perekonomian dan SDA;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perekonomian dan SDA;
- h. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
- j. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- l. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA membawahkan 2 (dua) sub koordinator yaitu Perekonomian dan Infrastruktur dan Kewilayahan dengan fungsi :

- 1) Sub Koordinator Perekonomian : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan SDA dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Perekonomian.



- 2) Sub Koordinator SDA : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perekonomian dan SDA dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang SDA.
- 6) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Pelaksanaan administrasi di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten;
 - j. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - k. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
 - l. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada



perangkat daerah.

Kepala Bidang Perekonomian dan SDA membawahkan 2 (dua) sub koordinator yaitu Infrastruktur dan Kewilayahan dengan fungsi :

- 1) Sub Koordinator Infrastruktur : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Infrastruktur.
- 2) Sub Koordinator Kewilayahan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Kewilayahan.
- 7) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengkoordinasian dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengkoordinasian dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. pengkoordinasian dalam pengelolaan dan fasilitasi program Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - e. pengkoordinasian dalam pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan;
 - f. pengkoordinasian dalam pelaksanaan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - g. pengkoordinasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. pengkoordinasian dalam pelaksanaan administrasi Bidang Penelitian dan Pengembangan;



- i. pengkoordinasian dalam pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan 3 (tiga) sub koordinator yaitu Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dengan fungsi :

- 1) Sub Koordinator Sosial dan Pemerintahan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan bidang sosial dan pemerintahan.
- 2) Sub Koordinator Ekonomi dan Pembangunan : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan bidang ekonomi dan pemerintahan.
- 3) Sub Koordinator Inovasi dan Teknologi : melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data Penelitian dan Pengembangan, penguatan kerjasama Penelitian dan Pengembangan, dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Badan sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam



menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional berdasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

1.3. Sumber Daya Bappedalitbang Kabupaten Tegal

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu lingkungan strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas/fungsi suatu organisasi. Dalam hal ini ketersediaan SDM Bappedalitbang yang berkualitas sebagai lingkungan strategis internal dapat diidentifikasi sebagai *strength* (kekuatan). Berdasarkan data kepegawaian Bappedalitbang Kabupaten Tegal pada Desember 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 37 pegawai, yang terdiri dari 21 pegawai laki-laki (58,33%) dan 15 pegawai perempuan (2,78%). Selain itu juga terdapat pegawai yang bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (pegawai Non ASN) sebanyak 10 pegawai, yang terdiri dari 7 pegawai Non ASN laki-laki (70%) dan 3 pegawai Non ASN perempuan (30%). Sehingga jumlah total ASN dan Non ASN pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal adalah sebanyak 46 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan untuk ASN Bappedalitbang didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2 sebanyak 12 (33,33%) pegawai, lulusan S1/diploma IV sebanyak 19 (52,78%) pegawai dan lulusan SMA sebanyak 5 (13,89%) pegawai. Sedangkan untuk pegawai Non ASN, 8 orang (80%) yang merupakan lulusan S1/DIV, 1 orang (10%) lulusan D3, sisanya sebanyak 1 orang (10%) merupakan lulusan SMA.

Jumlah dan komposisi ASN dan Non ASN pada Bappedalitbang Kabupaten Tegal Tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 1.1
Jumlah ASN dan Non ASN Bappedalitbang
Kabupaten Tegal Tahun 2021
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	ASN		Non ASN	
		Jumlah (Pegawai)	Persentase Terhadap ASN (%)	Jumlah (Pegawai)	Persentase Terhadap Non ASN (%)
1	S2	12	83,33	-	-
2	S1/D4	19	52,78	8	72,72
3	D3	-	-	1	9,09
4	SMA	5	13,89	1	18,18
	Jumlah	36	100	10	100
	Jumlah Seluruh Pegawai (ASN & Non ASN)			46 pegawai	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Selanjutnya untuk ASN bila dilihat dari golongan/ruang, dari 36 pegawai yang termasuk dalam golongan IV sebanyak 11 pegawai (29,73%), golongan III sebanyak 21 pegawai (58,33%), dan golongan II sebanyak 4 pegawai (10,81%), dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah ASN Bappedalitbang Kabupaten Tegal
Tahun 2021 Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (Pegawai)	Persentase Terhadap ASN (%)
1	Golongan IV	11	29,73
	IV/c	1	2,78
	IV/b	2	5,55
	IV/a	8	22,22



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

2	Golongan III	21	58,33
	III/d	5	13,89
	III/c	5	13,89
	III/b	7	19,44
	III/a	4	11,11
3	Golongan II	4	10,81
	II/d	3	8,33
	II/c	1	2,78
	JUMLAH	36	100

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Selain SDM, sarana/prasarana merupakan lingkungan strategis internal yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Dilihat dari jumlah maupun kondisinya, sarana/prasarana yang dimiliki Bappedalitbang Kabupaten Tegal relatif memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud.



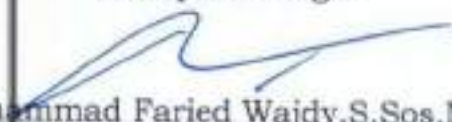
BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tegal untuk Tahun Anggaran 2022. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal. Catatan atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan keuangan mengingat banyaknya informasi yang tidak dapat dituangkan di LRA dan Neraca. Keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2022
Kepala Bappedalitbang
Kabupaten Tegal


Muhammad Faried Wajdy, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730801 199803 1003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Slawi, 31 Desember 2022

Kepala BappedaLitbang
Kabupaten Tegal


Muhammad Faried Wajdy, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19730801 199803 1003



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 SKPD : 5.01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
 Unit Organisasi : 5.01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
 Sub Unit Organisasi : 5.01.5-05.0-00.02.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
5	BELANJA	8.147.161.000,00	7.077.247.017,00	86,87	7.265.713.167,00
5.1	BELANJA OPERASI	7.902.961.000,00	6.835.732.337,00	86,50	6.941.097.367,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.272.967.000,00	2.981.280.528,00	91,09	3.266.983.803,00
5.1.02	Belanja Barang	4.629.994.000,00	3.854.451.409,00	83,25	3.674.113.564,00
5.2	BELANJA MODAL	244.200.000,00	241.514.680,00	98,90	324.615.800,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	150.586.000,00	149.895.000,00	99,54	324.615.800,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	76.364.000,00	76.119.680,00	99,68	0,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.250.000,00	15.500.000,00	89,86	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(8.147.161.000,00)	(7.077.247.017,00)	0	(7.265.713.167,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(8.147.161.000,00)	(7.077.247.017,00)	0	(7.265.713.167,00)

Slawi, 31 Desember 2022
 Kepala Bappedalitbang
 Kabupaten Tegala

Muhammad Faried Wajdy, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730801 199803 1003



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN OPERASIONAL


Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN
 SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
 Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
 Sub Unit Organisasi : 5-01.5-05.0-00.02.000.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN (%)
	KEGIATAN OPERASIONAL			
09	BEBAN	7.245.774.714,00	7.299.986.473,00	(54.211.759,00)
09.01.00	Beban Pegawai	2.961.290.928,00	3.255.983.803,00	(295.702.875,00)
09.02.00	Beban Perencanaan	1.111.239.470,00	1.030.498.015,00	80.771.455,00
09.03.00	Beban Jasa	1.474.002.826,00	1.991.309.282,00	(517.306.456,00)
09.04.00	Beban Pemeliharaan	312.068.948,00	173.147.074,00	138.922.874,00
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	913.531.000,00	430.729.337,00	482.802.343,00
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	453.649.862,00	417.147.902,00	36.502.860,00
09.13.00	Beban Lain-lain	0,00	201.960,00	(201.960,00)
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(7.245.774.714,00)	(7.299.986.473,00)	54.211.759,00
	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.245.774.714,00)	(7.299.986.473,00)	54.211.759,00
	POS LUAR BIASA			
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT	(7.245.774.714,00)	(7.299.986.473,00)	54.211.759,00

Slawi, 08 Maret 2023

PENGGUNA ANGGARAN


MUHAMMAD FARIED WAJDI, S.Sos, M.Si
 NIP. 197308011998031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000.0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	5.221.061.371,00	5.240.475.918,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.245.774.714,00)	(7.299.986.473,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	15,00	14.858.759,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.077.247.017,00	7.265.713.167,00
EKUITAS AKHIR	5.052.533.689,00	5.221.061.371,00

Slawi, 08 Maret 2023

PENGGUNA ANGGARAN

MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos, M.Si
NIP. 197308011998031003





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000.0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	1.260.000,00	4.616.800,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.260.000,00	4.616.800,00
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	4.861.212.145,00	4.807.817.145,00
Gedung dan Bangunan	4.478.961.397,00	4.402.741.717,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.578.033.476,00	2.578.033.476,00
Aset Tetap Lainnya	563.857.600,00	563.857.600,00
Akumulasi Penyusutan	(7.804.888.354,00)	(7.373.339.807,00)
JUMLAH ASET TETAP	4.777.076.264,00	4.978.110.433,00
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud Lainnya	40.404.000,00	0,00
Aset Lain-lain	257.551.280,00	257.551.280,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(10.101.300,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	287.854.280,00	257.551.280,00
JUMLAH ASET	5.068.190.546,00	5.241.281.513,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Belanja	13.656.857,00	20.220.142,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.656.857,00	20.220.142,00
JUMLAH KEWAJIBAN	13.656.857,00	20.220.142,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	5.052.533.689,00	5.221.061.371,00
JUMLAH EKUITAS	5.052.533.689,00	5.221.061.371,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.068.190.546,00	5.241.281.513,00

Slawi, 8 Maret 2023
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tegal


Muhammad Faried Waidy, S.Sos, M.Si
NIP. 19730801 199803 1003





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-Desember-2022

Hilang : Bidang Perencanaan

Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

U P B : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE ASET	NOMOR ASET	NAMA ASET	TARIKH PEROLEHAN	RELAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2021	PERYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2022	NILAI BUKU
Aset Tetap									
2		PERALATAN DAN MESIN		12,018,107,020					
1.3.2.1		ALAT BESAR		4,961,212,145		3,743,991,051	358,805,053	4.122.876.704	838.335.441
1.3.2.1.1		ALAT BAHUTU		192,426,000		69,407,429	24,605,714	94,013,143	98,412,887
1.3.2.2		ALAT ANGGKUTAN		1,283,306,879		1,246,345,159	135,740,426	1,376,086,587	407,221,288
1.3.2.2.1		ALAT ANGGKUTAN DARAT BERMOTOR		4,387,311		4,387,311	0	4,387,311	0
1.3.2.2.2		ALAT ANGGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		17,200,000		17,200,000	0	17,200,000	0
1.3.2.3		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		308,666,454		226,097,389	27,815,979	254,713,308	53,353,098
1.3.2.3.1		ALAT UKUR		1,253,627,751		965,093,186	73,031,463	1,038,124,649	215,993,102
1.3.2.3.2		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		230,827,590		218,555,300	3,785,040	222,711,340	8,116,160
1.3.2.3.3		ALAT KANTOR		352,946,633		283,412,677	34,080,191	318,390,868	34,565,765
1.3.2.5		ALAT RUMAH TANGGA		66,382,000		68,982,000	630,000	68,982,000	0
1.3.2.5.1		MEK DAN KURSI KECARAPAT PUMBAT		3,767,800		793,900	793,900	1,507,000	2,260,800
1.3.2.6		ALAT STUDIO, KOMPIKASI DAN PEMANCAR		2,900,000		1,075,000	312,500	2,187,500	312,500
1.3.2.6.1		ALAT STUDIO		549,585,952		594,213,857	40,478,105	544,691,962	4,898,000
1.3.2.6.2		ALAT KOMPIKASI		196,007,159		165,517,243	18,794,733	182,301,976	13,685,183
1.3.2.7		ALAT KEDOKTERAN DAN KESIHATAN		4,476,861,397		1,301,303,277	75,472,843	1.376.775.140	3.102.086.257
1.3.2.7.1		ALAT KEDOKTERAN		4,402,781,217		1,301,302,277	73,950,469	1,375,252,746	1,027,488,971
1.3.2.8		ALAT LABORATORIUM							
1.3.2.8.1		URET ALAT LABORATORIUM							
1.3.2.10		KOMPUTER							
1.3.2.10.1		KOMPUTER URUT							
1.3.2.10.2		PERALATAN KOMPUTER							
3		GEDUNG DAN BANGUNAN							
1.3.3.1		BANGUNAN GEDUNG							
1.3.3.1.1		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA							



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAY
LAPORAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Sampai dengan 31-Desember-2022

- Bidang : Bidang Perencanaan
Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
U P B : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE ASET	NO REG	NAMA ASET	TANPA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT	AKUMULASI PENYUSUTAN 31 Des 2021	AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2022	NILAI BUKU
1.3.3.4		TURU TITIK KONTROL/PASTI		76.119,680			1.572,394	74.597,286
1.3.3.4.1		TUGU/TANDA BATAS						
4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		2.578.033,476		2.296.946,164	2.305.236.510	272.796,668
1.3.4.1		JALAN DAN JEMBATAN						
1.3.4.1.1		JALAN		2.229,649,528		2.229,649,528		0
1.3.4.4		JARINGAN						
1.3.4.4.1		JARINGAN LISTRIK		288,948,950		36,462,636	43.161,232	245.387,718
1.3.4.4.2		JARINGAN TELEPON		49.835,000		19.534,000	22.405,790	27.409,250
1.3.4.4.3								
Aset Tetap yang dihapuskan				Jumlah Aset Tetap		7.361.339,492	7.804.888.354	4.213.218,666
				12.000,000				
				12.000,000		12.000,000	12.000,000	0
2		PERALATAN DAN MESIN						
1.3.3.2		ALAT ANGKUTAN		12.000,000				0
1.3.3.2.1		ALAT ANGKUTAN CIKRAT BERDROK		12.000,000				0
				Jumlah Aset Tetap yang dihapuskan		12.000,000	12.000,000	0
				Jumlah		7.373.339,492	7.816.888.354	4.213.218,666



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491494, 492023 Fax. (0283) 492023

BERITA ACARA STOK OPNAME BARANG PERSEDIAAN
Nomor : 030 /23/ 4843 /2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (30 - 12 - 2022) kami yang bertanda tangan :

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL.	NIP
1	MARTO	Penaa Muda Tingkat I/IIIb	19650606 199003 1 016
2	ANDI TRI MARDIYANTO	Pengatur Tingkat I / IIc	19630215 201001 1 006

Selaku Panitia Pemeriksa Barang, atas perintah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Tegal telah mengadakan pemeriksaan terhadap barang persediaan dengan rincian sebagai berikut :

Alat Listrik

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET
1	Lampu LED Bulb 8-60 Watt	12 buah	105.000	1.260.000	
JUMLAH				1.260.000	

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PENGURUS BARANG PENGGUNA


MARTO
NIP. 19650606 199003 1 016

PANITIA PEMERIKSA BARANG

1. MARTO
2. ANDI TRI MARDIYANTO, S.Ak







BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
DATA RINCIAN UTANG BEBAN 2022

NOMOR REKENING	URAIAN	JUMLAH
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.656.857
2.1.6	Utang Belanja	13.656.857
2.1.6.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	13.656.857
2.1.6.02.02	Utang Belanja Jasa	13.656.857
5.1.02.01 01.0059	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	112.345
5.1.02.01 01.0060	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	899.500
5.1.02.01 01.0061	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	9.592.512
5.1.02.01 01.0063	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Internet	3.052.500

Slawi, 1 Februari 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TEGAYAN



MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos., M.Si
NIP. 197308011998031003



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SALDO BUKU BESAR
Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000.0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.2.01.00	Alat Bantu	✓ 182.436.000,00	0,00
1.3.2.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	✓ 1.793.306.875,00	0,00
1.3.2.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	✓ 4.357.311,00	0,00
1.3.2.03.00	Alat Ukur	✓ 17.200.000,00	0,00
1.3.2.05.01	Alat Kantor	✓ 398.066.454,00	0,00
1.3.2.05.02	Alat Rumah Tangga	✓ 1.252.027.751,00	0,00
1.3.2.05.00	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	✓ 230.827.500,00	0,00
1.3.2.06.01	Alat Studio	✓ 352.946.633,00	0,00
1.3.2.06.02	Alat Komunitas	✓ 86.582.000,00	0,00
1.3.2.07.01	Alat Kedokteran	✓ 3.767.500,00	0,00
1.3.2.08.01	Unit Alat Laboratorium	✓ 2.500.000,00	0,00
1.3.2.10.01	Komputer Unit	✓ 549.586.002,00	0,00
1.3.2.10.02	Peralatan Komputer	✓ 196.007.159,00	0,00
	JUMLAH	4.891.212.145,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SALDO BUKU BESAR

Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000.0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

KODE REKENERG	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.3.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.402.741.717,00	0,00
1.3.3.04.01	Tugu/Tanda Batas	78.110.660,00	0,00
	JUMLAH	4.478.851.377,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SALDO BUKU BESAR
Periode 01 Januari 2022 s.d 31 Desember 2022

SKPD : 5-01.5-05.0-00.02 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan
Sub Unit : 5-01.5-05.0-00.02.000.0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

KODE REKENING	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.3.4.01.01	Jalan	2.239.648.529,00	0,00
1.3.4.04.02	Jaringan Listrik	298.548.950,00	0,00
1.3.4.04.03	Jaringan Telepon	49.635.000,00	0,00
	JUMLAH	2.578.033.479,00	0,00

